

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Suprayogo berpendapat bahwa sejarah panjang pendidikan pesantren di Indonesia dapat ditelusuri melalui beragam bentuk pendidikan yang biasanya dilaksanakan di mushola, masjid atau rumah-rumah penduduk dengan guru ngaji atau ustadz. Kemudian pada perjalanannya bentuk pendidikan berbasis keislaman, berbagai lembaga pendidikan yang pada awalnya berupa kumpulan anak-anak yang belajar pengetahuan keislaman pada tingkat dasar membaca Al-Qur'an, shalat dan sejenisnya, berubah bentuk isinya menjadi *madrasah diniyah* atau setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), lalu berkembang menjadi pondok pesantren. (Wathoni, Khorisul. 2020).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Bab I pasal 1 menyatakan bahwa Pesantren adalah lembaga yang berbasis kemasyarakatan dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam dan juga masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mempunyai akhlak mulia serta teguh terhadap ajaran Islam yang *rahmatan lil a'lamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan maupun pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di dalam Pondok Pesantren terdapat Guru Besar di bidang keagamaan khususnya Islam sekaligus pengasuh para muridnya yang biasa disebut dengan kyai. Sosok kyai bagi masyarakat dianggap berpengaruh dan penting dalam kelangsungan hidup keberagaman masyarakat. Kyai tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai keluh kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. (Jannah, Hasanatul. 2015).

Meskipun pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis keislaman, pada kenyataannya tidak luput pula terlibat dalam perpolitikan baik dari segi konstelasi politik lokal maupun tingkat nasional. Adapun pesantren sebagai bagian lembaga pendidikan berlandaskan keislaman yang berada di tengah lingkungan masyarakat mampu memberikan peran politik yang diperankan oleh kyai terhadap arus perpolitikan di tengah masyarakatnya sehingga kedepannya pesantren dengan peran politik yang diwakili oleh kyainya dapat menjadi representasi atau acuan ummat muslim khususnya dalam bergerak di dalam wilayah perpolitikan.

Sehingga ummat muslim di sekitar pondok pesantren tersebut tidak memiliki kebingungan harus bagaimana dalam berpolitik karena sudah memiliki tokoh yang disegani dan dianggap dapat dijadikan panutan oleh masyarakat dan salah satu Pondok Pesantren yang terlibat dalam berbagai konstelasi politik adalah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Praktek kegiatan politik yang terdapat di Pondok Pesantren Suryalaya di perlihatkan secara terang-terangan sehingga masyarakat umum pun dapat mengetahuinya.

Praktik keterlibatan dalam dunia politik Pondok Pesantren Suryalaya ada dua cara baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Pertama praktek kegiatan politik secara langsung dimulai ketika masa Orde Lama pada tahun 1945-1949 oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau biasa disebut dengan panggilan Abah Anom seseorang *mursyid Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah*. Dari tahun ke tahun Pondok Pesantren Suryalaya semakin berkembang, sesuai dengan tuntutan zaman maka pada tanggal 11 maret 1961 atas prakarsa H. Sewaka (alm) mantan Gubernur Jawa Barat (1947-1952) dan mantan Menteri Pertahanan RI Iwa Kusuma Sumantri (alm) (1952-1953) dibentuklah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dengan tujuan untuk membantu tugas Abah Anom dalam penyebaran *Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah* dan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada masa awal kepemimpinan Abah Anom, banyak mengalami kendala yang cukup mengganggu yakni diantaranya pemberontakan DI/TII. Pada masa itu Pondok Pesantren Suryalaya sering mendapat gangguan dan serangan, terhitung lebih dari 48 kali serangan yang dilakukan oleh DI/TII. Pada masa pemberontakan PKI tahun 1965, Abah Anom banyak membantu pemerintah untuk menyadarkan kembali anggota eks PKI untuk kembali ke jalan yang benar menurut agama Islam dan Negara. Perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya semakin berkembang pesat dan maju setelah membaiknya situasi keamanan pasca pemberontakan DI/TII, membuat masyarakat yang ingin belajar *Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah* semakin banyak dan berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Penyebaran yang dilakukan oleh

para wakil *talqin* dan para *mubaligh*, berfungsi juga untuk melestarikan ajaran yang tertuang dalam asas tujuan *Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah* dan *Tanbih*. Berlanjut pada masa Orde Baru politik Abah Anom memutuskan untuk mendukung sekber Golongan Karya atau disebut Golkar sejak awal berdirinya pada 1963. Hingga pada akhir hayatnya terbentuklah sebuah ikatan yang sangat dekat antara presiden Soeharto dengan abah anom. (Sulaeman, Ade. 2020).

Islam sebagai agama samawi terakhir memiliki banyak ciri khas (*khashaish*) yang membedakannya dari agama lain. Beberapa ciri khas diantaranya adalah sikap berdiri di tengah (*tawassuth*), sikap seimbang dalam segala hal (*tawazun*) dan sikap tegak lurus (*i'tidal*). (Abdusshomad, M. 2009). Pertama, dalil yang menjadi pedoman sikap berdiri di tengah (*tawassuth*) yang tidak ekstrim kanan ataupun kiri, terdapat di dalam Firman Allah SWT:

نَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ *عَدْلًا*

Dan demikianlah Kami jadikan kamu sekalian (ummat Islam) ummat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian. (Al Baqarah: 143).

Kedua, dalil yang menjadi landasan sikap seimbang dalam segala hal (*tawazun*) termasuk di dalamnya berfikir secara rasional dengan akal yakni menggunakan (*dalil aqli*) maupun menggunakan panduan Al Quran dan As *Sunnah (Hadits)* atau (*dalil naqli*), terdapat di dalam Firman Allah SWT:

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sungguh Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama dengan mereka dengan Al Kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

(Al Hadid: 25).

Ketiga, dalil yang menjadi landasan dalam sikap tegak lurus (*i'tidal*) terdapat dalam Firman Allah SWT:

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berbuat adil lah karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al Maidah: 8).

Dengan adanya petunjuk yang berupa dalil-dalil dalam Al Qur'an, sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia, khususnya di dalam kehidupan Pondok Pesantren Suryalaya, sikap kyai maupun santri-santrinya dalam memperjuangkan kehidupan masyarakat maupun bergerak dalam ruang lingkup politik tidak akan luput dari peran kyai yang mengajarkan nilai-nilai keislaman yang kuat kepada para santrinya dan menjadi tolak ukur dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai keislaman, sosial dan politik yang dibuktikan dari berbagai tindakan dalam sejarah yang disebutkan sebelumnya.

Pergeseran paradigma dalam pembahasan peran agama dan politik telah menjadi sorotan utama dalam kajian ilmu sosial dan politik. Terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada pluralitas agama dan keanekaragaman budaya, peran agama, khususnya yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama seperti kyai, memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Kaitannya dengan hal ini, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya menjadi salah satu fokus penelitian yang menarik untuk memahami bagaimana peran kyai dalam memengaruhi partisipasi politik warga di sekitarnya, khususnya pada Pemilihan Presiden tahun 2019.

Pesantren memiliki posisi unik dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, melainkan juga pusat pembentukan karakter, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Kyai, sebagai pemimpin dan guru di pesantren, memiliki pengaruh yang kuat terhadap santri dan masyarakat di sekitarnya. Namun, peran kyai dalam partisipasi politik masyarakat belum sepenuhnya dipahami dengan baik.

Pemilihan Presiden tahun 2019 di Indonesia menjadi konteks yang menarik untuk diteliti karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah politik negara. Peran kyai dalam mempengaruhi partisipasi politik warga sekitar pesantren menjadi penting untuk diungkap, mengingat kyai memiliki otoritas moral dan spiritual yang signifikan dalam komunitas mereka. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, sebagai studi kasus, memberikan kesempatan untuk menganalisis peran kyai dalam konteks ini.

Pesantren memiliki peran penting dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, pesantren tidak hanya menjadi tempat bagi pengembangan ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat penanaman nilai-nilai sosial dan politik. Di tengah kompleksitas dinamika politik nasional, pesantren seringkali menjadi tempat di mana warga masyarakat berinteraksi, termasuk dalam partisipasi politik pada konteks pemilihan umum.

Kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh kyai dalam lingkungan pesantren telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam partisipasi politik. Kyai tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur yang dihormati dan dijadikan panutan oleh warga sekitar pesantren. Oleh karena itu, peran kyai dalam membentuk dan mengarahkan partisipasi politik masyarakat di sekitar pesantren menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Dalam sebuah demokrasi, partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator kesehatan politik suatu bangsa. Partisipasi politik masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Partisipasi politik bukan hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembentukan masa depan negara.

Pemilihan Presiden merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi, di mana masyarakat berkesempatan untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan. Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang sangat dinanti oleh masyarakat. Pemilihan ini memunculkan berbagai perbincangan, kampanye politik, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kandidat pilihannya.

Dalam konteks ini, peran kyai atau pemimpin agama tradisional di pesantren memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat sekitar pesantren. Kyai bukan hanya figur spiritual dan pendidik agama, tetapi juga sosok yang memiliki otoritas moral dan pengaruh dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik. Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga pendidikan agama yang memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks inilah, penelitian dengan judul "Peran Kuasa Kyai Terhadap Partisipasi Politik Warga Sekitar Pesantren Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya)" dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana peran kyai dalam memengaruhi partisipasi politik warga sekitar pesantren, terutama pada pemilihan presiden tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampak dan implikasi dari peran kyai terhadap partisipasi politik tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai peran kyai dalam konteks partisipasi politik warga masyarakat sekitar pesantren, serta menggambarkan interaksi antara agama dan politik dalam lingkungan pesantren. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang dinamika politik di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan peran lembaga agama dalam membentuk partisipasi politik masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran kuasa kyai Pondok Pesantren Suryalaya terhadap partisipasi politik warga sekitar pesantren dalam pemilihan Presiden tahun 2019 pasca abah anom wafat?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk penulisan di dalam penelitian dengan judul “Peran Kuasa Kyai Terhadap Partisipasi Politik Warga Sekitar Pesantren Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019” berfokus kepada bagaimana peran kuasa yang dilakukan oleh kyai terhadap partisipasi politik warga sekitar pesantren dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 dan menjelaskannya secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni mewawancarai kyai pimpinan pesantren ataupun wakilnya, beberapa politisi yang berdomisili di dekat Pondok Pesantren Suryalaya dari partai yang ikut pilpres tahun 2019 dan beberapa tokoh masyarakat di sekitar pesantren.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dibuatnya usulan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat wajib di dalam skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa dan manfaat penelitian yang dilakukan ini memiliki manfaat teoritis yang tidak lain adalah untuk mencoba mempelajari bagaimana kyai berperan dalam politik pada masa pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019 serta menyesuaikannya dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian dan manfaat praktisnya yakni bertujuan untuk bisa mengetahui bagaimana kyai berperan dalam politik di Pondok Pesantren Suryalaya sehingga diharapkan dapat menambah kecintaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam, mengetahui bahwasanya Islam sebagai sebuah agama tidak luput dari tindakan politik dan menambah kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka berkat perjuangan seluruh masyarakat khususnya umat Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia hingga saat ini.